

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN
INDUSTRI AGRO, KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL**

NOTA DINAS

NOMOR: AK.03/235/D.V.M.EKON.2/10/2026

Yth. : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan
Pariwisata
Dari : Asisten Deputy Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan
Tekstil
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 12 Oktober 2026

Dalam rangka implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dengan hormat kami sampaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 Asisten Deputy Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Asisten Deputy Pengembangan Industri Agro,
Kimia, Farmasi, dan Tekstil,



Eripson M. H. Sinaga
NIP 197810102006041004

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Triwulan III Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III	Realisasi s.d Triwulan III 2026	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
1.1	Indikator Kinerja 1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB	Persentase	3,9%	-	NA	NA
II	Sasaran kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
2.1	Indikator Kinerja 2.1 Persentase efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro	Persentase	80%	60%	60%	100%
2.2	Indikator Kinerja 2.2 Persentase efektivitas Penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	Persentase	80%	60%	60%	100%

2.3	Indikator Kinerja 2.3 Persentase efektivitas Penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global	Persentase	80%	60%	71%	100%
III	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
3.1	Indikator Kinerja 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Indeks	3 dari 4	N/A	N/A	N/A
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
4.1	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Presentase	92%	74%	74%	100%

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1:

Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu : “Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB”.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB

Latar Belakang

Prioritas Nasional 5 (PN 5) dalam RPJMN 2025-2029 menargetkan terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan melalui pembangunan fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, terintegrasi, dan berdaya saing global. Keberhasilan sasaran ini dicapai salah satunya melalui **peningkatan kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IAKFT) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)**. Untuk mencapai target tersebut, Asisten Deputi Pengembangan IAKFT berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sektor industri pengolahan non-migas, khususnya Industri AKFT.

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari BPS, Industri AKFT pada Sektor Industri Pengolahan mencakup 9 sub-bidang yaitu: (i) Industri Makanan dan Minuman; (ii) Industri Pengolahan Tembakau; (iii) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; (iv) Industri Furnitur; (v) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (vi) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; (vii) Industri Barang Galian bukan Logam; (viii) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; dan (ix) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki. Dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi Pengembangan IAKFT berkoordinasi erat dengan Kementerian Perindustrian sebagai mitra kerja utama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2025, Industri AKFT mencatatkan kontribusi signifikan sebesar 65,60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan. Peran strategis masing-masing sub-sektor adalah (i) Industri Agro menyediakan bahan baku utama contohnya bagi industri makanan, minuman, dan tekstil (serat alam); (ii) Industri Kimia dan Farmasi, menyediakan input penting dalam proses produksi di industri agro (pupuk, pestisida), tekstil (pewarna, bahan finishing), bahan aktif obat, hingga manufaktur secara umum; dan (iii) Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagai padat karya memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas yaitu penyerapan tenaga kerja dalam skala besar.

Target persentase realisasi rencana aksi Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB tahun 2026 adalah sebesar **3.9%**.

Pengukuran peningkatan kontribusi IAKFT melalui formula:

$$\begin{aligned} & \text{Peningkatan kontribusi IAKFT terhadap PDB(\%)} \\ &= \Sigma \frac{(\text{Kontribusi IAKFT terhadap PDBt} - \text{Kontribusi IAKFT terhadap PDBt} - 1)}{\text{Kontribusi IAKFT terhadap PDBt} - 1} \end{aligned}$$

Kontribusi Industri AKFT merupakan kumulatif (penjumlahan) dari 9 sub-bidang industri pengolahan, yaitu:

1. Industri Makanan dan Minuman;
2. Industri Pengolahan Tembakau;
3. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman;
4. Industri Furnitur;
5. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional;
6. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
7. Industri Barang Galian bukan Logam;
8. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; dan
9. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan data BPS, kontribusi industri AKFT meliputi 9 sub bidang industri pengolahan antara lain (i) Industri makanan dan minuman; (ii) Industri Pengolahan Tembakau; (iii) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; (iv) Industri Furnitur; (v) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (vi) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; (vii) Industri Barang Galian bukan Logam; (viii) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; (ix) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

Adapun besaran target kinerja pada tahun 2026 sesuai IKU 1.1. adalah Persentase Realisasi Rencana aksi Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB tahun 2026 adalah sebesar **3,9%***.

Persentase Realisasi Rencana aksi Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB tahun 2026 merupakan target tahunan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB	Presentase	3,9*	NA**	NA**

*target tahun 2026, **Sumber: BPS (2026)

Persentase realisasi peningkatan kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB triwulan III tahun 2026 merupakan target tahunan sehingga target belum dapat dicapai. Sampai dengan dibuatnya laporan ini, BPS belum merilis *update* PDB triwulan III tahun 2026 sehingga realisasi pada triwulan III tahun 2026 belum dapat diperoleh. Namun, terkait rencana aksi pada triwulan III yang mendukung peningkatan kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB telah terlaksana.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) 5 RPJMN 2025-2029, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Sasaran Strategis yaitu “Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas” untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Rencana aksi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Finalisasi penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan strategis terkait produktivitas dan daya saing Industri AKFT;
2. Penyusunan dokumen rekomendasi penyelesaian isu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Industri AKFT.

Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB			
	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Finalisasi penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan strategis terkait produktivitas dan daya saing Industri AKFT	Terlaksana	Telah dilaksanakan pemetaan isu dan permasalahan strategis melalui beberapa kegiatan ; a. <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan (6 Juli 2026) b. Menghadiri Rapat Lanjutan Pembahasan Kebijakan Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia (29 Juli 2026) c. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2026 (11 Agustus - 1 September 2026) d. Diskusi Kinerja Industri IAKFT (17 September 2026) e. Audiensi dengan GGGI (4 Agustus 2026) f. Menghadiri FGD Dampak FTA terhadap Kinerja Ekonomi dan Industrialisasi Indonesia (20 Agustus 2026) g. Menghadiri Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 2026 (27 Agustus 2026)
2	Penyusunan dokumen rekomendasi penyelesaian isu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Industri AKFT.	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait antara lain: a. Diskusi Perkembangan Tindak Lanjut Implementasi Kewajiban Halal di Oktober Tahun 2026 (Juli - September 2026) b. Penyampaian Bahan Paparan Reindustrialisasi Indonesia, Memutar Roda Perekonomian

			Nasional dalam Bisnis Forum Indonesia kepada Plt Deputy V (8 Juli 2026) c. Tanggapan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Industri Hijau oleh Kemenperin (September 2026) d. Diskusi Perkembangan transformasi industri menuju industri hijau, termasuk isu energi bersih, bersama WRI Indonesia (28 September 2026)
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Posisi Indonesia pada Perundingan ASEAN India Trade in Goods Agreement (AITIGA) (24 Agustus 2026)
2. Menghadiri Rapat Koordinasi Lanjutan terkait AITIGA (3 September 2026)
3. Menghadiri Rapat Pembahasan Kesiapan Pengawasan dan Penerapan Wajib Sertifikasi Halal (3 Agustus 2026)
4. Menghadiri FGD Pemberdayaan Perempuan (6 Agustus 2026)
5. Menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan Posisi Indonesia pada Perundingan ASEAN India Trade in Goods Agreement (1-2 September 2026)

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, selain itu efisiensi dilakukan pada anggaran konsumsi rapat. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas Zoom Meeting sesuai arahan pimpinan guna efisiensi anggaran yang masih dalam proses peninjauan ulang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kondisi ketidakstabilan geopolitik dan perang dagang global yang berdampak signifikan terhadap rantai pasok industri dalam negeri dan pangsa pasar ekspor nasional. Industri dalam negeri mengalami peningkatan harga bahan baku dan penurunan produksi. Hal ini menyebabkan kinerja dan utilitas industri menjadi tidak optimal.

2. Perubahan struktur organisasi di seluruh K/L beserta penyesuaian nomenklatur yang berdampak pada efektivitas koordinasi antar K/L untuk beradaptasi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru Presiden Prabowo.
3. Pemblokiran anggaran pada masa transisi nomenklatur dan struktur organisasi di seluruh K/L serta arahan efisiensi anggaran oleh Presiden yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada tahun 2026, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dengan upaya menyusun rekomendasi perbaikan. Poin-poin penting yang menunjang keberhasilan dari beberapa program/kegiatan tersebut diantara adalah:

1. Dalam beberapa Rapat Koordinasi Industri AKFT, kementerian teknis dan seluruh *stakeholder* terkait telah berupaya mendorong transformasi industri yang adaptif, inovatif dan berkelanjutan.
2. Dalam rangka memitigasi dinamika perekonomian global akibat ketidakstabilan politik, perang dagang global, dan perubahan iklim global seluruh K/L dan *stakeholder* terkait berupaya menjaga stabilitas pemenuhan bahan baku, penguatan tata niaga impor dan peningkatan pangsa pasar ekspor.
3. Dalam rangka mengatasi hambatan akibat efisiensi anggaran, Asdep IAKFT mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia seperti melaksanakan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan ruang rapat kantor dan/atau menggunakan fasilitas *zoom online meeting* agar rencana aksi dapat tetap tercapai secara optimal. Selain itu, dilakukan penetapan revisi alokasi anggaran yang lebih dikontrol agar lebih optimal dan tepat sasaran sehingga rencana aksi dapat dicapai secara keseluruhan.
4. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian sebagai prasyarat dalam setiap permintaan data berkala yang diterbitkan oleh unit dimaksud.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

- 2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro
- 2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri
- 2.3. Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro, antara lain:

1. Penyelesaian isu strategis dan penyusunan rekomendasi permasalahan dalam komoditas hilirisasi industri agro
2. Penyusunan alternatif dan rekomendasi pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain:

(i) Undangan rapat dan daftar hadir rapat; (ii) Laporan/diskusi isu strategis dalam komoditas hilirisasi industri agro; (iii) Laporan/diskusi potensi pemenuhan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam, dsb.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain:

(i) Laporan terkait alternatif kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro; (ii) Laporan terkait tindak lanjut penyusunan alternatif pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam, dsb.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;

- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain:
 (i) Laporan terkait monitoring dan evaluasi kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro;
 (ii) Laporan terkait Monitoring dan evaluasi konsep pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam, dsb

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain:
 (i) Konsep dokumen rekomendasi terkait Hilirisasi Industri Agro; (ii) Konsep dokumen rekomendasi pemenuhan bahan baku berbasis sumber daya alam, dsb.

Adapun formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase penyelesaian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan III sebesar 60% didasarkan pada tren-tren di Kemenko Perekonomian pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kebijakan pada tahun 2026.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro yang

mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% dari target Triwulan III Tahun 2026 sebesar 60% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro	Persentase	60%	60%	100%

Realisasi triwulan III secara kumulatif mencapai target sebesar 60% dengan rincian:

- Monitoring dan evaluasi kegiatan terkait Hilirisasi Industri Agro (60%) yang telah dilakukan, menyelenggarakan Diskusi Kinerja dan Perkembangan Industri Makanan dan Minuman (17 September 2026), Monitoring Harmonisasi RPermenkes tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (Juli-September 2026), dan Monitoring dan Diskusi terkait Kemitraan Kelapa di IPB (10 September 2026).
- Monitoring dan evaluasi konsep pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam (60%) yang telah dilakukan Monitoring dan Diskusi Pengembangan Komoditas Malapari di Bogor (28 Juli 2026) dan Ikut serta dalam FGD Penguatan Kebijakan Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol (21 Agustus 2026).

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian terkait Hilirisasi Industri Agro			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi kegiatan terkait Hilirisasi Industri Agro	Terlaksana	Telah dilaksanakan rangkaian Pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam komoditas hilirisasi Industri Agro melalui: • Monitoring Harmonisasi RPermenkes tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (Juli-September 2026) • Menghadiri Rapat Koordinasi

			Eselon I dan Rapat Koordinasi Pembahasan Pasal Alternatif Rancangan Permenkes tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (22 dan 23 Juli 2026) • Monitoring dan Diskusi terkait Kemitraan Kelapa di IPB (10 September 2026) • Audiensi dengan Agrinex (24 Agustus 2026) • Audiensi dengan AmCham (18 Agustus 2026) • Diskusi Kinerja dan Perkembangan Industri Makanan dan Minuman (17 September 2026)
2.	Monitoring dan evaluasi konsep pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam	Terlaksana	• Monitoring dan Diskusi Pengembangan Komoditas Malapari di Bogor (28 Juli 2026) • Ikut serta dalam FGD Penguatan Kebijakan Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol (21 Agustus 2026).

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Pembahasan Draft Rancangan Kepmenko tentang Tim Koordinasi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) (14 Juli 2026)
2. Ikut serta dalam Diskusi Pengembangan Komoditas Teh Nasional (6 Juli 2026)
3. Ikut serta dalam Rapat Pemaparan Teknologi Fingerprint pada Perangkat Rokok Elektronik Terintegrasi e-KTP (18 Agustus 2026)
4. Menghadiri Rapat Pembahasan Pra-Inisiasi Penyelidikan Anti Subsidi atas Produk Uncoated Writing & Printing Paper Asal Indonesia tanggal 20 Agustus 2026
5. Menghadiri Diseminasi Hasil Studi Peralihan Preferensi Konsumen ke Produk Hasil Tembakau yang Lebih Murah (Downtrading) (17 September 2026)

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, selain itu efisiensi dilakukan pada anggaran konsumsi rapat. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi;

2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas Zoom Meeting sesuai arahan pimpinan guna efisiensi anggaran yang masih dalam proses peninjauan ulang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Penyesuaian terhadap struktur dan tata kelola kerja, mencakup adaptasi lingkungan kerja serta redistribusi tugas dan fungsi pegawai, merupakan implikasi langsung dari implementasi kebijakan reorganisasi kelembagaan;
2. Sebagai unit kerja baru pasca-reorganisasi, membangun kembali hubungan dengan mitra eksternal membutuhkan waktu dan upaya signifikan untuk memperkenalkan kembali unit, menjelaskan peran barunya, serta membentuk kembali kepercayaan dan sinergi yang efektif;
3. Keterbatasan ketersediaan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme koordinasi internal di lingkungan unit terkait;
4. Pemblokiran anggaran pada masa transisi nomenklatur dan struktur organisasi di seluruh K/L serta arahan efisiensi anggaran oleh Presiden yang menyebabkan beberapa kegiatan dibidang Industri Agro tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mempertimbangkan adanya kebijakan efisiensi anggaran maka akan terus didorong kegiatan koordinasi secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*.
2. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan dan tantangan industri kelapa sebagai tindak lanjut atas pembahasan terkait penguatan kemitraan antara industri dan petani kelapa.
3. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan dan tantangan industri makanan dan minuman.
4. Memonitor pembahasan perkembangan regulasi terkait IHT agar tetap memperhatikan keseimbangan antara aspek kesehatan, keberlanjutan industri, penerimaan negara, dan perlindungan tenaga kerja serta petani.

2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Dan Pengendalian Kebijakan Terkait

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan,

**Penguatan
Ekosistem Industri
Kimia Dalam
Negeri**

Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri mencakup industri kimia hulu, industri kimia hilir, dan farmasi, dan industri pengolahan barang galian non logam, antara lain:

1. Penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri.
2. Harmonisasi Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat; (ii) Laporan Rapat/Diskusi Isu Strategis Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (iii) Laporan Rapat/Diskusi Evaluasi Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri, dsb.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan

perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Laporan terkait Penyelesaian Isu Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (ii) Laporan terkait Tindak Lanjut Penyusunan Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dsb.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Laporan terkait Alternatif Penyelesaian Isu Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (ii) Rumusan RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dsb.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara

partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Konsep Dokumen Rekomendasi dalam rangka mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (ii) Dokumen Penetapan Permenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dsb.

Adapun formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase penyelesaian Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan III sebesar 60% didasarkan pada tren-tren di Kemenko Perekonomian pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kebijakan pada tahun 2026.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% dari target Triwulan III Tahun 2026 sebesar 60% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Dan Pengendalian Kebijakan	Persentase	60	60	100

Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri				
--	--	--	--	--

Realisasi triwulan III secara kumulatif mencapai target sebesar 60% dengan rincian:

- a. Penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri meliputi sektor Kimia, Farmasi, dan SKPBGN berada pada tahap 3 (60%) yakni telah dilaksanakan serangkaian pembahasan kebijakan Tata Niaga Impor Bahan Baku Obat (Juli - September 2026) dan Pembahasan Kebijakan Perdagangan dan Perlindungan Industri Dalam Negeri Khususnya Pada Sektor Farmasi dan Alat Kesehatan Nasional (29 dan 30 September 2026).
- b. Harmonisasi Draf RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan telah dilakukan pada tahap 3 (60%) yakni Nota Dinas Laporan Tindak Lanjut Penyusunan Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (7 Agustus 2026) serta telah dilaksanakannya Diskusi membahas Penyelarasan Masukan Dan Pandangan Teknis RPermenko Tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan Dan Ketahanan Kesediaan Industri Farmasi Dan Alat Kesehatan (8 September 2026).

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri

No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri meliputi sektor Kimia, Farmasi, dan SKPBGN melalui: <i>Fact Finding Mission</i> (FFM) Komite Bidang Perdagangan OECD Sesi <i>Local Content Requirements</i>, termasuk Pembahasan Sektor Farmasi tanggal 15 Juli 2026; Serangkaian Pembahasan Kebijakan Tata Niaga Impor Bahan Baku Obat pada bulan Juli - September 2026; Menghadiri Harmonisasi Peraturan Menteri Perindustrian tentang SNI untuk meningkatkan daya saing industri seperti revisi Permenperin No. 11 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat Secara Wajib tanggal 17 Juli 2026, RPermenperin tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Eksportir Terdaftar, Rekomendasi Importir Produsen dan Pertimbangan Teknis Impor Prekursor Non Farmasi tanggal 26 Agustus 2026, dan RPermenperin Tentang Tata Cara Penerbitan

			Rekomendasi Dan Pertimbangan Teknis Ekspor Produk Batubara tanggal 2 September 2026; Pembahasan Persiapan Penyusunan Roadmap Percepatan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan tanggal 27 Juli 2026; Diskusi membahas Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) berupa Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak untuk KBLI 20292 (Industri Bahan Peledak) tanggal 4 Agustus 2026; Diskusi tindak lanjut hasil Rapat Pemantauan Capaian Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Biologi tanggal 6 Mei 2026 khususnya dengan belum aktifnya fitur <i>freeze-unfreeze</i> pada Katalog Elektronik Versi 6 tanggal 6 Agustus 2026; Pembahasan Draft Perubahan Permendag 25/2021 terkait revisi Lampiran B.5 tentang Lembaran Krisotil beserta aspek kesehatan tanggal 31 Agustus dan 3 September 2026; Pembahasan penyelesaian isu-isu strategis dengan Kemenperin dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor industri Kimia, Farmasi, dan ISKPBGN tanggal 16 September 2026.
2.	Harmonisasi Draft RPermenko tentang Koordinasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka mendukung penyusunan Draft RPermenko tentang

	Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan		Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan melalui: (i) diskusi Sektoral Dalam Rangka Harmonisasi Regulasi Untuk Keamanan Dan Aksesibilitas Obat Bahan Alam Yang Berkelanjutan tanggal 2 Juli 2026; (ii) Diskusi Sektoral Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Kesehatan dan Kemandirian Industri Nasional Subsektor Bahan Baku Obat serta Monev ke PT Kimia Farma Plant Banjaran tanggal 21 Juli 2026; dan (iii) diskusi Kebijakan Perdagangan dan Perlindungan Industri Dalam Negeri Khususnya Pada Sektor Farmasi Dan Alat Kesehatan Nasional serta Monev ke PT Daewoong Infion Plant tanggal 29 dan 30 September 2026. Telah dilaporkan rencana penyusunan RPermenko melalui ND Nomor PIN.03/71/D.V.M.EKON/08 /2026 dan disetujui oleh Disposisi Menko Nomor 2701. Telah dilaksanakan Harmonisasi Draf RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan diantaranya: (i) diskusi Bilateral Pembahasan Rumusan Draf RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan tanggal 24 Juli 2026; dan (ii) penyelarasan
--	--	--	--

			Masukan dan Pandangan Teknis RPermenko Tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan Dan Ketahanan Kesiediaan Industri Farmasi Dan Alat Kesehatan bersama dengan K/L tanggal 8 September 2026.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah

1. Turut serta pada pembahasan tindak lanjut kendala yang dihadapi oleh PT Lotte Chemical Indonesia terkait: (i) Pembebasan Bea Masuk Impor LPG; (ii) Pemanfaatan Fasilitas Tax Holiday; (iii) Pembebasan Bea Masuk Impor (*Masterlist*) untuk Bahan Baku; dan (iv) Penggunaan Fasilitas Pelabuhan Bersama di antara Afiliasi Lotte Chemical.
2. Ikut serta memantau pembahasan penyelesaian *Pending Matters* Kerja Sama Indonesia-Thailand dalam rangka Kunjungan PM Thailand Agustus 2026. Pembahasan terkait akses PT KIA dan PT KKM pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang diblokir oleh Satgas BLBI sejak 2022 atas dasar tagihan piutang negara eks-BPPN.
3. Berpartisipasi dalam koordinasi dan evaluasi capaian penyelenggaraan percepatan eliminasi Tuberkulosis (TB) berdasarkan amanat Perpres 67/2021 tentang Penanggulangan TB. Salah satunya dengan monitoring capaian pada perkembangan pemenuhan obat terapi TB dan alat *Near Point of Care* (NPOC).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan secara *hybrid* melalui pemanfaatan ruang rapat kantor dan *Zoom Meeting*. Salah satu implementasinya adalah Rapat Pembahasan isu-isu strategis di Kemenperin dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor industri Kimia, Farmasi, dan ISKPBGN (16 September 2026) dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting*.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses harmonisasi dalam penyusunan kebijakan memerlukan waktu yang relatif panjang karena pembagian kewenangan antarlembaga yang kompleks;

2. Adanya hambatan birokrasi lintas kementerian/lembaga, terutama akibat sejumlah reorganisasi pada kementerian/lembaga terkait, sehingga koordinasi menuntut upaya yang lebih besar, baik untuk memperkenalkan program kerja maupun untuk menghimpun masukan dan pandangan dalam penyusunan serta implementasi kebijakan. Sebagai contoh dalam tahun 2026 telah terjadi 2 kali pergantian kepala pusat P3DN dan Kemenperin.
3. Validasi data multi sektoral: integrasi data perdagangan (ekspor-impor), produksi domestik, dan neraca komoditas kerap terkendala oleh perbedaan klasifikasi, satuan, serta periode pendataan antarinstansi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Menyikapi adanya kompleksitas pembagian kewenangan antar lembaga dengan intens berkoordinasi guna menghindari tumpang tindih regulasi.
2. Menjalin konektivitas yang lebih erat antar pemangku kepentingan guna komunikasi lintas sektor yang efektif dalam implementasi kebijakan.
3. Mengupayakan kolaborasi teknis dalam penyelarasan data guna menghindari *dispute* data termasuk melalui surat permohonan data.

2.3. Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global, antara lain:

1. Pemetaan isu strategis dan permasalahan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA;
2. Evaluasi Kebijakan dan Pembahasan penyelesaian isu serta permasalahan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA;
3. Penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA;

4. Penyusunan rekomendasi perbaikan/ penyempurnaan kebijakan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya: (i) Konsep Alternatif Kebijakan: Kajian Arah Pengembangan Industri TPT; (ii) Laporan Diskusi Isu Strategis Industri Alas Kaki; (iii) Laporan Diskusi Strategi Integrasi Bahan Baku Berkelanjutan (*Sustainable Material*) dalam Rantai Pasok Industri TPT, dsb.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Laporan terkait Implementasi Kebijakan/Program Industri TPT dan/atau Alas Kaki (i.e Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada Industri TPT), dsb.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya: (i) Laporan terkait Evaluasi Kebijakan/Program Industri TPT dan/atau Alas Kaki; (ii) Laporan Monitoring Perkembangan Kinerja Industri Tekstil dan Alas Kaki, termasuk kesiapan Industri dalam Mengoptimalkan manfaat IEU-CEPA, dsb.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya: (i) Konsep Dokumen *Press Release* Kegiatan terkait proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki, (ii) Konsep Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki, dsb.

Adapun formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- **Nilai Akhir Persentase penyelesaian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan III sebesar 60% didasarkan pada tren-tren di Kemenko Perekonomian pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kebijakan pada tahun 2026.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 71% dari target Triwulan III Tahun 2026 sebesar 60% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.3 Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global	%	60	71	100

Realisasi triwulan III secara kumulatif mencapai target sebesar 71% dengan rincian:

- a. Kebijakan Ekosistem Industri TPT dan Alas Kaki berada di seluruh tahapan yakni tahap 1 s.d 4 (46%) melalui dukungan berbagai kegiatan, diantaranya berupa: rapat tim teknis restrukturisasi mesin TPT; partisipasi dalam forum ILF-IGT Manufacturing; diskusi strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi; serta diskusi pembahasan alas kaki global bersama Nike Indonesia.
- b. Kebijakan *Sustainable Textile* dan Budaya Lokal berada di tahapan 1 dan 3 (25%) melalui dukungan berbagai kegiatan, diantaranya berupa: monitoring pengembangan tekstil budaya lokal di Makassar; diskusi

integrasi aspek berkelanjutan pada produk alas kaki di Jawa Timur; partisipasi dalam pelatihan CE SG; serta partisipasi dalam dialog dekarbonisasi industri oleh ICGD.

Pelaksanaan kedua kebijakan di atas mendukung pencapaian target Persentase efektivitas penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.3 Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian terkait Peningkatan Daya Saing industri Tekstil dan Alas Kaki			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan peningkatan daya saing industri TPT dan Alas Kaki meliputi: • Melakukan Monitoring dan Diskusi terkait Pengembangan tekstil Berbasis Budaya Lokal Pada IKM Tenun di Kota Makassar dan Kab. Gowa (10 Juli 2026) • Menghadiri Rapat Tim Teknis 1 s.d 4 Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT (30 Juli, 3 Agustus, 13 Agustus, dan 10 September 2026) • Menghadiri Diskusi ILF-IGT Manufacturing Forum 2026 (5 Agustus 2026) • Menyelenggarakan Monitoring dan Diskusi Integrasi Aspek Berkelanjutan (Sustainability) Dalam Peningkatan Daya Saing Produk Alas Kaki di

			Jawa Timur (9-10 Agustus 2026) • Menghadiri Diskusi Strategi Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi (3 September 2026) • Mengikuti Pelatihan untuk Pimpinan Circular Economy Steering Group (CE SG): “The Art of Stakeholder Collaboration” (9-11 September 2026) • Berpartisipasi dalam Rapat Pembahasan Alas Kaki Global bersama Nike Indonesia (15 September 2026) • Penyiapan Bahan Ratas Presiden terkait Industri Tekstil dan Alas Kaki (22 September 2026) • Menelaah informasi terkait PHK di sektor TPT dan Alas Kaki (27 September 2026) • Menghadiri Sosialisasi Tata Cara Penerbitan Pertek Impor TPT (29 September 2026) • Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan internal guna mendukung pengambilan kebijakan (seperti penyusunan bahan ratas maupun analisis kebijakan bidang tekstil dan alas kaki)
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya komprehensif lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja tersebut antara lain.

- 1) Turut berpartisipasi dalam forum *Workshop a Regional Launch Event of UNIDO Industrial Development Report 2026 and Indonesia Development Talks 24th Edition* (23 Juli 2026);
- 2) Turut serta dalam pembahasan kebijakan halal di sektor industri AKFT (Agustus - September 2026);
- 3) Menghadiri Pameran Digital Transformation Indonesia (DTI) Series & CRD-CX 2026 (3 Agustus 2026);

- 4) Menghadiri Seminar Indonesia Retail Summit & Expo (IRSE) 2026 (28 Agustus 2026);
- 5) Turut berpartisipasi dalam pembahasan potensi pengembangan PLTS Atap di Kawasan Industri (2 September 2026);
- 6) Menghadiri Dialog Dekarbonisasi Industri dan Konsultasi *Draft Policy Brief* “Anchoring the Delivery Enabler for Green Industrial Competitiveness” (17 September 2026); serta
- 7) Menelaah informasi terkait PHK di sektor TPT-AK (September 2026).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan secara *hybrid* melalui pemanfaatan ruang rapat kantor dan Zoom Meeting. Salah satu implementasinya adalah Diskusi Perkembangan Kinerja Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil pada 17 September 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Beberapa K/L Pengampu belum menetapkan koordinator utama untuk menangani isu tertentu, seperti pengembangan tekstil berkelanjutan (*sustainable textile*). Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya hasil yang diharapkan.
2. Perubahan data yang sangat dinamis dan masih terbatas akibat jeda waktu (*time lag*) publikasi oleh instansi pengampu data seperti Pusdatin Kementerian Perindustrian dan *website* BPS, khususnya untuk data utilisasi industri dan perdagangan.

Berdasarkan tantangan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Menyelenggarakan diskusi pengelolaan sisa hasil produksi / limbah Industri di Kawasan Berikat sebagai rangkaian dalam pengembangan ekosistem tekstil berkelanjutan (*sustainable textile*).
2. Menyelenggarakan forum diskusi bilateral bersama instansi pengampu data (e.g Kementerian Perindustrian, BPS) secara rutin dalam kurun waktu triwulanan untuk pembaruan data kinerja industri AKFT, khususnya pada sektor TPT dan alas kaki.
3. Menyelenggarakan diskusi merumuskan solusi tantangan ketenagakerjaan sektor TPT dan Alas Kaki bersama instansi pengampu (Kemenaker, Kemenperin, dll) dilengkapi validasi dengan tinjauan ke industri.
4. Memperbarui informasi mengenai perkembangan isu industri TPT dan alas kaki melalui pemantauan media (*media monitoring*) secara mingguan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: “Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil”.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survei}}{\text{Jumlah Item survei}}$$

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil memiliki target yaitu 3 dari 4 atau memuaskan. Survei ditargetkan untuk dilaksanakan pada triwulan II dan Triwulan IV berdasarkan tren tahun sebelumnya.

Hingga akhir triwulan III tahun 2026, telah dilaksanakan survei kepuasan pada triwulan II dan didapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil sebesar 3,46 atau memuaskan. Adapun ringkasan pencapaian Tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Indeks	3 dari 4*	N/A**	100

*target tahun 2026

**realisasi TW III Tahun 2026

Dalam pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil realisasi pada triwulan III tahun 2026 berupa N/A karena survei evaluasi tahap kedua akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2026. Capaian kinerja belum dapat diukur karena rencana aksi pada triwulan III hanya berupa penyiapan survei terkait Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Analisis hasil survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil termasuk menyusun rekomendasi perbaikan survei dan persiapan survei selanjutnya	Terlaksana	Telah dilakukan analisis atas hasil survei kepuasan layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Selain itu, telah disusun rekomendasi perbaikan survei dan perencanaan survei selanjutnya

Selama Triwulan III Tahun 2026, telah dilakukan analisis atas hasil survei kepuasan layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil tahap pertama yaitu didapatkan indeks kepuasan sebesar 3,46 (memuaskan) atau 100% dari target. Survei evaluasi tahap pertama menggunakan 24 item survei dan melibatkan 20 responden dari *stakeholders* IAKFT, baik dari K/L, Akademisi, Asosiasi, maupun pelaku usaha. Sigma rerata jawaban masing-masing item survei sebesar 83,02 sehingga bila dibagi dengan jumlah item survei didapat nilai akhir 3,46 (memuaskan).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah pelaksanaan rapat untuk membahas identifikasi responden survei yang dilaksanakan di dalam kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target yang ditetapkan, antara lain:

1. Tidak semua calon responden yang telah diidentifikasi mengisi survei layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian tahap 1, sehingga survei perlu disebarkan kepada pihak di luar daftar awal untuk memenuhi kuota minimal responden.
2. Calon responden survei layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pada tahap ini belum mempertimbangkan proporsi keterwakilan dari kementerian/lembaga, pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat umum

Sebagai upaya perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, kendala dalam pencapaian target tersebut akan diatasi dengan rekomendasi yaitu memperbarui daftar calon responden dengan memperhatikan keterwakilan setiap kelompok stakeholder agar hasil survei lebih representatif.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil”.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan III sebesar 74% didasarkan pada tren-tren pemenuhan target tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang terealisasi sebesar 74% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Presentase	74	74	100

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Rencana aksi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 adalah Optimalisasi implementasi arsip digital melalui SRIKANDI serta penyusunan narasi kinerja Triwulan III.

Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	- Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja - Penyusunan matriks manajemen risiko - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III - Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2026 - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI Triwulan III	Terlaksana	Telah disusun Tim kerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil Telah disusun matriks manajemen risiko Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil Telah disusun laporan kinerja triwulan III tahun 2026 pada bulan Oktober Telah disusun TOR dan RAB atas revisi Renja tahun anggaran 2026 Telah disusun TOR dan RAB tahun anggaran 2027 sesuai dengan hasil revidi dari Biro MKKS Dalam rangka menindaklanjuti hasil

			Evaluasi AKIP, Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil telah melengkapi dokumen bukti dukung dan survei evaluasi AKIP tahun 2026 Telah disusun dokumen Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik) Telah dilaksanakan pengelolaan dokumen kearsipan yang mendukung implementasi arsip digital melalui aplikasi SRIKANDI secara berkala
--	--	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Sebagai contoh penyusunan PK, Manual IKU, dan Rencana Aksi dilaksanakan di dalam kantor, penyusunan Narasi Kinerja dilaksanakan di dalam kantor, dan penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk memudahkan semua pegawai mengakses dengan cepat dokumen kearsipan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah karena terdapat pemberlakuan efisiensi dan blokir anggaran K/L sehingga penyerapan anggaran masih kecil.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka upaya atau rekomendasi perbaikan yang dilakukan diantaranya adalah penetapan revisi alokasi anggaran yang lebih dikontrol agar lebih optimal dan tepat sasaran sehingga rencana aksi dapat dicapai secara keseluruhan.